



KAA Bandung: Relasi Indonesia Tiongkok dan Alat Diplomasi Zhou Enlai

Imron Rosyadi Hamid

Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU

Tak banyak yang tahu, tujuh puluh empat tahun lalu ada keterlibatan India dalam sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok. Awalnya, Proklamator Kemerdekaan, Bung Hatta berkirim surat pemberitahuan tentang berdirinya Negara Indonesia Serikat (RIS) kepada Pemerintah Tiongkok. Surat bertanggal 11 Januari 1950 itu baru sampai ke Beijing Empat puluh tujuh hari berikutnya. yang kemudian dibalas melalui nota Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai pada tanggal 29 Maret 1950 melalui perantara instansi urusan luar negeri India kepada Muhammad Hatta. Pada Tanggal 13 April 1950 Bung Hatta kemudian membalas kembali nota tersebut sebagai tanda dibukanya hubungan diplomatik Indonesia – Tiongkok. Lima tahun berikutnya, Bulan April Tahun 1955, untuk pertama kalinya PM Tiongkok Zhou Enlai datang ke Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, sebuah perhelatan dua puluh sembilan

negara yang oleh Palmer dan Perkins (1985) disebut sebagai salah satu *the most remarkable international gathering* dalam sejarah dunia abad 20. Tulisan ini akan membahas peran KAA Bandung dalam kaitannya dengan proses perdamaian dunia dan munculnya Tiongkok dan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru abad 21.

Dasasila Bandung dan Lima Prinsip Perdamaian Tiongkok

Pemerintah Tiongkok memiliki *sense of belonging* terhadap Konferensi Asia Afrika bukan hanya karena pernah menjadi peserta aktif tetapi juga memiliki saham kesejarahan dalam melahirkan Dasasila (sepuluh prinsip) yang merupakan pengembangan Lima Prinsip hidup damai sebagaimana yang disampaikan Perdana Menteri Zhou Enlai selama pertemuan di Ibukota Provinsi Jawa Barat itu berlangsung. Daniel S. Papp (1984) secara eksplisit menyebut bahwa Konferensi Asia Afrika di Bandung telah mengadopsi ‘Lima Prinsip Hidup Berdampingan’ (*Five Principles of Coexistence*) yang disponsori negeri Tirai Bambu. Lima Prinsip itu meliputi saling menghormati terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan (*mutual respect for territorial integrity and Sovereignty*), tidak melakukan agresi (*non aggression*), tidak melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain (*non-interference in the internal affairs of others*), kesetaraan dan saling menguntungkan (*equality and mutual benefit*), serta hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*). Ketika berpidato di Kantor PBB Jenewa Tahun 2017, Presiden

Tiongkok Xi Jinping menyebut Lima prinsip hidup berdampingan secara damai yang dihasilkan Konferensi Asia Afrika di Bandung merupakan salah satu pedoman yang harus dijalankan komunitas dunia dalam berbagi membangun masa depan umat manusia.



Dokumentasi Zhou Enlai ketika hadir di KAA Bandung 1955
Sumber: Kantor Penerangan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Tiongkok-Indonesia, China Intercontinental Press, 2007

Signifikansi KAA dan Kekuatan Baru Dunia

Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di pertengahan abad 20 ternyata memiliki pengaruh bagi munculnya kekuatan baru dunia abad 21. Amitav Acharya (2016) pernah menulis sebuah artikel berjudul *Studying the Bandung Conference from a Global IR Perspective* untuk ‘menggugat’ arus utama akademisi dunia yang tidak menempatkan Konferensi

Asia-Afrika (KAA) di Bandung Tahun 1955 sebagai sesuatu yang penting dalam studi Hubungan Internasional. Guru besar Hubungan Internasional American University Washington ini mengemukakan sejumlah warisan kunci (*key legacies*) Konferensi Asia-Afrika menyangkut dinamika politik negara-negara peserta dengan dunia barat (Amerika dan Inggris), pengaruhnya dalam mendelegitimasi pakta pertahanan, serta pengembangan gerakan non blok yang berimplikasi pada pergeseran dan perimbangan kekuatan dunia. Acharya menyebut Tiongkok dan Indonesia – disamping India, Jepang, Turki, Saudi Arabia yang menjadi peserta KAA – kini muncul sebagai kekuatan dunia yang tergabung dalam G-20 (sembilan belas negara plus Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar dunia). Sebagai kekuatan raksasa baru dunia, Tiongkok tengah memasuki sebuah era yang disebut William Callahan (2013) sebagai *Taiping Shenshi* (perdamaian dan kemakmuran), sebuah tujuan yang *in line* dengan Deklarasi Bandung.

Sabotase Menjelang KAA

Hari itu, 11 April 1955, *Kashmir Princess*, sebuah pesawat jenis Lockheed-749A, yang membawa rombongan delegasi Tiongkok ke Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung, meledak di atas perairan Natuna akibat bom waktu. Bom itu dipasang di dekat roda pesawat sebelah kanan oleh agen rahasia Kuomintang, dengan memanfaatkan petugas kebersihan Bandara Kai Tak Hongkong bernama Zhou Zhu alias Zhou Zemin. Kejadian ini menjadi peristiwa sabotase pertama yang menimpa pesawat terbang komersial sejak perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berlangsung. Steve

Tsang (1994), dalam tulisannya berjudul *Target Zhou Enlai: The Kashmir Princess Incident of 1955* menceritakan bahwa meskipun pesawat milik Air India yang disewa pemerintah Tiongkok itu meledak di ketinggian 18 ribu kaki dan 108 mil di utara Kalimantan menewaskan belasan penumpangnya yang mayoritas jurnalis, Perdana Menteri Zhou Enlai tidak berada di dalamnya. Dia selamat karena berganti pesawat lain menuju Indonesia melalui Kunming Burma, setelah menerima informasi adanya upaya pembunuhan high ranking Chinese officials yang dikirimkan otoritas Hong Kong lewat Kedutaan Inggris di Beijing, sesaat sebelum Kashmir Princess transit di Bandara Kai Tak. Meskipun ada upaya pembunuhan, Zhou Enlai tetap berkeras untuk hadir ke Bandung karena KAA dianggap sebagai forum penting yang akan membantu meningkatkan reputasi Tiongkok di pentas dunia.

Zhou Enlai Keturunan Muslim

Gagalnya upaya pembunuhan terhadap Zhou Enlai membawa keberuntungan lain, yakni Da Pusheng—ulama senior, yang juga menjadi Wakil Ketua Persatuan Islam Tiongkok—ikut selamat karena menemani perdana menteri berganti pesawat. Delapan bulan sebelumnya, Da Pusheng pernah menerima delegasi muslim Indonesia di Beijing sehingga kehadirannya di KAA Bandung menjadi penting, mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari Da Pusheng didapatkan cerita bahwa Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai memiliki leluhur muslim. Seorang ilmuwan etnologi Tiongkok bernama Li Jianbiao (2017) dalam bukunya yang berjudul *Da Pusheng*

Pingzhuan (Biografi Da Pusheng) menjelaskan bahwa selama perjalanan menuju Indonesia, Perdana Menteri Zhou Enlai banyak berdiskusi dengan Da Pusheng berkait dengan Islam dan memberikan penjelasan kebijakan PKC tentang keberadaan agama-agama, serta peran pentingnya dalam diplomasi Tiongkok. Perdana Menteri pertama 'Negeri Tirai Bambu' tersebut juga menceritakan bahwa memiliki leluhur muslim meskipun tidak hafal dari generasi ke berapa. Dalam sebuah penelitian pada 2015, Zhou Bingyi yang juga salah satu keponakan Zhou Enlai, menjelaskan bahwa pemimpin Tiongkok modern ini memiliki leluhur bernama Zhou Mao, seorang keturunan Hui muslim dan juga hakim di Yaozhou Kota Shaanxi selama periode Kaisar Shizu di era Dinasti Yuan.

Sumber Daya Diplomasi Tiongkok di KAA Bandung

Dari 29 negara peserta KAA Bandung, 12 di antaranya ialah negara Arab dan ditambah tuan rumah, Indonesia, yang juga merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim. Komposisi kepesertaan KAA seperti ini sudah diantisipasi oleh Zhou Enlai dengan mengajak beberapa tokoh muslim Tiongkok menjadi bagian delegasi resmi. Selain mengajak Da Pusheng, Zhou Enlai juga mengajak Prof Liu Linrui dari Universitas Peking sebagai penerjemah bahasa Arab. Linrui merupakan putra dari Liu Pinda, Wakil Direktur Asosiasi Muslim Tiongkok. Dalam sebuah artikel berjudul *China's Cultural and Public Diplomacy to Countries in the Middle East*, Ma Lirong, akademisi dari Kajian Internasional Universitas Shanghai menyebutkan bahwa selain membawa dua tokoh muslim Tiongkok ke KAA Bandung, Zhou Enlai juga membawa

beberapa alat diplomasi lainnya, yakni Al- Qur'an, Konstitusi Tiongkok dalam bahasa Arab, serta buku berjudul *Chinese Muslim Life and China's Muslims* (Lirong, 2010).

Dengan membawa konstitusi dalam bahasa Arab, delegasi KAA Bandung baik yang berasal dari negara-negara Arab maupun muslim diharapkan bisa memahami konstitusi Tiongkok yang menjamin kebebasan memeluk agama ataupun tidak memeluk agama bagi warga negaranya. Dalam Pasal 36 Konstitusi Tiongkok disebutkan bahwa 'Setiap warga negara menikmati kebebasan memeluk agama. Tidak ada organ negara, organisasi publik atau individu yang dapat memaksa warga negara untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara yang memeluk atau tidak memeluk agama'. Tidak itu saja, salah satu delegasi Tiongkok, Da Pusheng selama di Bandung juga terlihat aktif melakukan salat lima waktu setiap hari dan membuat banyak pejabat dan masyarakat muslim yang hadir di KAA menjadi kagum. Banyak delegasi KAA yang memuji kebijakan Tiongkok terhadap keberadaan Islam setelah melihat perilaku dan kebiasaan beribadah Da Pusheng secara langsung. Perdana Menteri Zhou Enlai sangat senang dengan situasi tersebut (Jianbiao, 2017).

Dalam pidato tambahannya di Konferensi, Zhou Enlai secara khusus memperkenalkan Da Pusheng dan berbicara tentang masalah keyakinan agama. Salah satu paragraf pidato Zhou Enlai berbunyi, "Kebebasan beragama adalah prinsip yang diakui oleh negara-negara modern. Kami komunis adalah ateis, tetapi kami menghormati orang yang beragama. Tiongkok adalah negara beragama, sebuah negara bebas, tidak

hanya memiliki 7 juta anggota partai komunis, tetapi juga puluhan juta muslim dan Buddha, jutaan Kristen dan Katolik. Ada seorang muslim yang taat dalam delegasi Tiongkok di konferensi ini namanya Da Pusheng. Keadaan semacam ini tidak menghalangi persatuan di Tiongkok, mengapa orang-orang dengan keyakinan agama dan orang tanpa keyakinan tidak dapat bersatu dalam keluarga besar negara-negara Asia-Afrika?

Dalam pidato resminya, Zhou Enlai menyoroti terjadinya praktik-praktik kolonialisme dan terjadinya penganiayaan dan pembantaian warga oleh kekuatan penjajah di beberapa negara Afrika Utara dan Timur Tengah dengan menyebut empat nama bangsa, yakni Tunisia, Maroko, Aljazair, dan Arab Palestina. Tidak itu saja, Tiongkok secara tegas mendukung integritas teritorial beberapa negara peserta KAA yang berpenduduk mayoritas muslim seperti Mesir yang tengah berjuang memulihkan kedaulatannya atas Terusan Suez, Iran, yang atas sumber minyaknya, dan Indonesia atas Irian Barat. Pidato Zhou Enlai di KAA tersebut mendapatkan sambutan hangat dan melepaskan keraguan banyak pihak, terutama delegasi dari negara-negara Arab dan muslim tentang bahaya paham komunisme di Tiongkok terhadap keberadaan agama-agama.



Dokumentasi rombongan delegasi Muslim Indonesia disambut
Santri Perguruan Islam di Beijing, 28 Mei 1956

Sumber: Kantor Penerangan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok,
Tiongkok-Indonesia, China Intercontinental Press, 2007

Diplomasi Haji Tiongkok

Kehadiran Tiongkok di Konferensi Bandung selain ingin meningkatkan reputasi internasionalnya di Asia dan Afrika di tengah perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, juga memiliki beberapa agenda lain, di antaranya menuntaskan persoalan dwi kewarganegaraan dengan Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, Tiongkok juga ingin melobi delegasi Arab Saudi di KAA Bandung berkaitan dengan penerbitan izin masuk jemaah haji Tiongkok tanpa melalui negara ketiga. Chen Guangyuan (2005) dalam karyanya, *Xin Shidai Ahong Shiyong Shouce* menyebutkan

ikhtiar delegasi Tiongkok di KAA untuk melobi Saudi Arab agar memberikan visa bagi jemaah hajinya secara langsung. Sebelumnya, jemaah haji Tiongkok bisa masuk ke Saudi Arabia melalui Pakistan dan pernah mengalami insiden ditolak karena alasan politik. Sejarah mencatat, lobi pemerintah Tiongkok terhadap delegasi Saudi Arabia di KAA Bandung berkait dengan visa haji berhasil dengan baik. Zhou Enlai akhirnya bertemu dan meyakinkan Pangeran Faisal dari Kerajaan Saudi Arabia menyangkut perlunya visa haji bagi muslim Tiongkok. Setelah KAA di Bandung, jemaah haji Tiongkok bisa langsung masuk ke Haramain tanpa melalui Pakistan. Dalam sebuah tulisan berjudul *The Impact of Islamic Hajj on PRC-Saudi Relations* yang diterbitkan oleh Journal of Islamic Research (2020), keberhasilan lobi visa haji Tiongkok ini telah memainkan peran penting sebagai ‘pemecah kebekuan’ dalam simpul sejarah normalisasi hubungan RRC-Arab Saudi, melalui konsultasi aktif dan efektif tentang isu-isu agama secara jujur antara Perdana Menteri Zhou Enlai dan Pangeran Faisal di Konferensi Bandung Tahun 1955. Normalisasi pengiriman jemaah haji Tiongkok ke Saudi Arabia bisa dilakukan kembali di era Deng Xiaoping hingga sekarang. Pada 2016, pemerintah Tiongkok memasukkan perbaikan pelayanan haji dalam National Action Plan 2016-2020 mereka. Jika sekarang kita sering melihat jemaah haji Tiongkok di Saudi Arabia, itu merupakan berkah dari KAA Bandung. Sebagai sebuah ikhtiar diplomasi Zhou Enlai untuk melayani rakyatnya yang beragama Islam. Suatu ketika Zhou Enlai pernah berkata, “Diplomasi dilakukan melalui hubungan antara dua bangsa, tetapi titik akhirnya tetap melayani rakyat.” (Lirong, 2010).

Kemitraan Strategis dan Penanganan Covid-19

Sejak normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok yang dilakukan Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Li Peng Tanggal 8 Agustus 1990, kerjasama kedua negara hingga hari ini menunjukkan *trend* yang terus meningkat. Salah satu *milestone* peningkatan kerjasama Indonesia dengan Tiongkok adalah deklarasi kemitraan strategis (*strategic partnership*) yang dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao Tahun 2005. Penandatanganan Kemitraan Strategis ini menjadi salah satu kesepakatan paling penting dalam sejarah hubungan kedua negara. Kemitraan strategis itu meliputi tiga bidang utama dan *di-breakdown* dalam dua puluh delapan butir sub bidang kerjasama. Tiga bidang itu meliputi Kerjasama Politik dan Keamanan, Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, serta Kerjasama Sosial Budaya dan Lain-lain. (lihat: Tiongkok-Indonesia (2007). Pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Indonesia awal Oktober 2013, kemitraan strategis dikembangkan lagi secara lebih detail melalui penandatanganan *Comprehensive Strategic Partnership* pada tanggal 2 Oktober 2013 dan sudah dijalankan melalui serangkaian kerjasama di berbagai bidang baik ekonomi dan pembangunan maupun sosial budaya oleh kedua negara hingga hari ini.

Dalam kaitan penanganan penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, kesepakatan Kemitraan Strategis Indonesia dengan Tiongkok Tahun 2005 telah menyediakan instrumennya. Dalam butir kedua puluh tujuh terdapat kalimat *menguatkan kerjasama dan peningkatan kemampuan*

dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit menular dan tidak menular. Pemerintah dan Rakyat Tiongkok telah menunjukkan kepedulian yang tinggi dalam membantu Indonesia menangani penyebaran Wabah Corona melalui pengiriman peralatan medis dan berbagai paket bantuan lain. Tentu, Pemerintah dan Rakyat Indonesia perlu menyampaikan satu kata kepada Rakyat Tiongkok : Xie xie!. Wallahu a'lam bi as shawab.

**) Tulisan ini terdiri dari dua kolom yang pernah dimuat dengan judul "Hubungan Indonesia Tiongkok dan Dasasila Bandung", (detik.com, 18 April 2020) dan "Wajah Islam Tiongkok di KAA Bandung" (Media Indonesia, 15 April 2023 dengan beberapa perubahan dan penyesuaian.*

Referensi:

- Acharya, A. (2016). Studying the Bandung Conference from a Global IR perspective. *Australian Journal of International Affairs*, 70.
- Callahan, W. A. (2013). *China dreams: 20 visions of the future*. Oxford University Press.
- Zuhri, A. S., et al. (2019). *Islam Indonesia dan China*. Aswaja Memonopoli.
- Palmer, N. D., & Perkins, H. C. (1985). *International relations: The world community in transition* (3rd ed.). CBS India.
- Perkins, H. C., & Palmer, N. D. (1985). *International relations: The world community in transition* (3rd ed.). CBS Publisher & Distributor.

- Guangyuan, C. (2005). *Xinshiqi Ahong shiyong shouce* [新时期阿訇实用手册]. Beijing.
- Kantor Penerangan Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok. (2007). *Tiongkok-Indonesia*. China Intercontinental Press.
- Haccin, C.-S. (2020). The impact of Islamic Hajj on PRC-Saudi relations. *Journal of Islamic Research*, 31(2).
- Papp, D. S. (1984). *Contemporary international relations: Frameworks for understanding*. Macmillan.
- Li, J. (2017). 达浦生评传 [Dapusheng pingzhuan]. 作家出版社 [Zuojia Chubanshe].
- Tsang, S. (1994). Target Zhou Enlai: The “Kashmir Princess” incident of 1955. *The China Quarterly*, 139.
- Xi, J. (2017). *Xi Jinping: The governance of China* (1st ed.). Foreign Language Press.
- Ma, L. (2010). China’s cultural and public diplomacy to countries in the Middle East. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 4(2), 37-38.

Tentang Penulis:

Imron Rosyadi Hamid adalah Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Buku-bukunya yang telah terbit adalah *Tak Lekang Ditelan Zaman* (2024), *Persemaian Patriotisme Pesantren* (2007),



dan *Oil for People* (2021). Ia pernah mendapatkan beasiswa penelitian ke Amerika Serikat (2007), menjadi ketua Iluni Pascasarjana UI (2009), dan Pemimpin Umum *Jurnal Dialektika Unira* (2016–2017).